

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
INTISARI	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode dan Sumber Penelitian	18
F. Pendekatan dan Kerangka Konseptual	22
G. Sistematika Penulisan	35
BAB II SOSIO-HISTORIS DAN PERAN PEREMPUAN ADAT DI POLLUNG	37
A. Kondisi Geografis, Demografis dan Ekologis Kecamatan Pollung	38
B. Dinamika Sosial dan Ekonomi Masyarakat Adat Pollung	44
1. Sejarah Masyarakat Marbun Pollung	45
2. Tombak Haminjon sebagai Penopang Ekonomi	51
3. Struktur Sosial dan Peran Gender di Pollung	61
C. Kebijakan dan Pemicu Konflik Agraria di Pollung	70
BAB III DINAMIKA KONFLIK AGRARIA DI POLLUNG 1983-2016	77
A. Fase Awal: Masuknya Konsesi Industri <i>Pulp</i> 1983 - 1998	78
1. Pemberian Izin Konsesi PT IIU	79
2. Aktivitas Awal Perusahaan dan Respon Masyarakat	85
B. Fase Eskalasi dan Perlawanan Terbuka 1998-2007	90
1. Momentum Politik Reformasi dan Berhentinya PT IIU	90
2. Transformasi PT IIU ke PT TPL	94
3. Pemicu Konflik di Pollung: Penebangan Hutan Kemenyan	99
C. Fase Konsolidasi Gerakan dan Advokasi Jaringan 2009-2016	105
1. Formalisasi Gerakan Perlawanan di Pollung	105
2. Dampak Konflik Agraria di Pollung	115
D. Upaya Penyelesaian Konflik di Pollung	123

BAB IV ANATOMI GERAKAN PERLAWANAN: SINERGI PEREMPUAN ADAT, KSPPM DAN GEREJA DI POLLUNG	145
A. Peran Perempuan Adat Marbun Pollung dalam Perlawanan	146
1. Bentuk-bentuk Perlawanan	147
a. Perlawanan Domestik	147
b. Perlawanan Konfrontasi	150
2. Peran Perempuan Adat Pasca Konflik	152
B. Peran Organisasi Non-Pemerintah	158
1. Peran Pendampingan KSPPM	158
2. Peran Organisasi Non-Pemerintah Lainnya	167
C. Dukungan Institusional Gereja	170
1. Legitimasi Teologis dan Gereja sebagai Simbol Perlawanan	171
BAB V PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
BIBLIOGRAFI	181
LAMPIRAN	191
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	225

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Humbang Hasundutan	40
Gambar 2. Hamadjuon Bangso Batak, Surat Kabar Immanuel 1920	54
Gambar 3. Kegiatan Menyadap Kemenyan	55
Gambar 4. Kemenyan Sebelum Diproses	59
Gambar 5. Presiden Soeharto Mengesahkan Industri Kertas di Indonesia	80
Gambar 6. Peta Konsesi HTI Milik PT. IIU	84
Gambar 7. Aksi Utusan Kepala Desa Menolak TPL di DPR RI	89
Gambar 8. Aksi Damai di DPRD Humbang Hasundutan	100
Gambar 9. Aksi Bersama di Tombak Haminjon	108
Gambar 10. Audiensi Masyarakat oleh Op. Putra Boru	109
Gambar 11. Aksi Orasi dan Audiensi Di DPRD Sumatera Utrara	112
Gambar 12. Aksi Masyarakat Mempertahankan Hutan Kemenyan	112
Gambar 13. Plang Kawasan di Tombak Haminjon	114
Gambar 14. Penyerahan SK Hutan Adat di Istana Presiden	115
Gambar 15. Proses Mangulosi Presiden Joko Widodo	115
Gambar 16. Maduma Coffee dan Toba Benzoin of Struggle	154
Gambar 17. Aktivitas Pasca-konflik oleh Ina Maduma	155
Gambar 18. Ina Maduma Diberikan Pelatihan Budi Daya Kopi	156
Gambar 19. Pelatihan dan Sosialisasi oleh KSPPM	161
Gambar 20. Pelatihan Berbasis Gender oleh KSPPM	163
Gambar 21. Pelatihan Hukum Kritis (PAKLOR)	164
Gambar 22. Pelatihan Gender dan KDRT di KSPPM	166
Gambar 23. Gereja Sebagai Tempat Kumpul Gerakan	172
Gambar 24. Diskusi Mengenai Hutan Kemenyan di Gereja	174



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Kemenyan di Humbang Hasundutan	56
---	----

DAFTAR ISTILAH

1. Agrarische Wet : Undang-Undang Agraria pada masa kolonial Hindia Belanda pada tahun 1870.
2. Dalihan Natolu : Secara harfiah berarti tungku yang berkaki tiga, ini adalah filosofi dan sistem sosial dalam masyarakat Batak yang menjadi kerangka bagi hubungan kekerabatan.
3. Eigendom : Istilah dari bahasa Belanda yang berarti hak milik.
4. Ekofeminisme : Sebuah cabang dari feminisme yang melihat adanya hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan perusakan lingkungan alam.
5. Haminjon : Sebutan dalam bahasa Batak untuk kemenyan (*Styrax benzoin*), yaitu getah dari pohon kemenyan.
6. Huta : Dalam konteks budaya Batak, huta adalah sebuah perkampungan atau desa yang dikelilingi oleh benteng tanah dan bambu.
7. Martombak : Istilah dalam bahasa Batak yang berkaitan dengan sistem pengelolaan lahan atau kepemilikan. Tombak sendiri bisa merujuk pada hutan atau lahan warisan. Martombak dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan tombak tersebut.
8. Repelita : Singkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun.
9. Tombak : Dalam budaya Batak, *tombak* merujuk pada sebidang tanah, seringkali berupa hutan atau kebun, yang merupakan warisan dari leluhur suatu marga. *Tombak* ini seringkali dikelola secara komunal atau memiliki aturan adat yang melekat dalam pemanfaatannya.
10. Ulayat : Hak penguasaan kolektif atas tanah beserta sumber daya alam di atasnya yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat.

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BAKUMSU	: Bantuan Hukum Sumatera Utara
BPPHT	: Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman
DKN	: Dewan Kehutanan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HKBP	: Huria Kristen Batak Protestan
HPH	: Hak Pengelolaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IUU	: Indorayon Inti Utama
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPHSU	: Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara
KSPPM	: Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
PARBATO	: Partungkaon Batak Toba
PGI	: Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
TPL	: Toba Pulp Lestari
UU	: Undang-Undang
WGT	: Working Group Tenure